

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku,

- Achmad Anwari, 1994, *Leasing di Indonesia*, Cet. 3, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gambir, Sri Melati Hatta, 2000, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*. PT. Alumni.
- Hadi Suprpto, Hartono, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.
- Hardijan, Rusli. 2006. *Metode Penelitian Hukum Normatif : Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume V Nomor 3 Tahun 2006
- Irawan, Bagus, 2007, *Aspek - Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, Alumni, Bandung.
- Moleong, Lexy. J, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Nating, Imran, 2005, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim, H. HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, cet.1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Bandung.
- Soekanto, Soerjono.1986.*Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchun, 1980, *Hukum Benda*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Susilowati, Etty.2013.*Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Badan Penerbit Undip Press, Semarang.
- Subhan, Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya.

Sjahdeini, Sutan Remy, 2010, *Hukum Kepailitan*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Sukardi, 2003, *Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Bumi Aksara, Jakarta.

Susilowati, Etty, 2013, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Badan Penerbit Undip Press, Semarang.

Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widjaja, Gunawan, dan Ahmad Yani, 2001, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wijayanta, Tata dan Muhammad Bagas A. H., 2020, *Cross Border Insolvency, Kerjasama Lintas Batas Antar Lembaga Peradilan: Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Wijayanta, Tata dan Sheva Trisandya Adistia., 2023, *Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Wijayanta, Tata, 2015, *Undang Undang dan Praktik Kepailitan : Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Yuhassarie, Emmy, 2004, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.

B. Skripsi/Penelitian/Jurnal

Elviani Sagala, “Efektifitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Untuk Menghindarkan Debitur Dari Pailit”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*, Labuhan Batu., Vol. 03. No. 01. Maret 2015, hlm 38-56

Eva Puspita dan Sari Evi Kongres, “Kepastian Hukum Terhadap Proses PKPU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, Vol. 6, No. 1, Februari 2023.hlm. 1-13

Muhammad Fitratallah Dahlan, “Analisis Hukum terhadap Penolakan Perdamaian oleh Kreditur yang Diajukan Debitor pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Volume 5 Number 1 (2023) January-Juni 2023,.hlm. 537-546

Rai Mantili dan Putu Eka Trisna Dewi “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terkait penyelesaian utang dalam kepailitan”, *Jurnal Aktual Justice*, Universitas Ngurah Rai, Denpasar, Vol. 6, No. 1, Juni 2021.hlm. 1-19

Wijayanta, Tata, “Kajian Tentang Peraturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol. 26, No.01, Februari 2014.hlm 1 - 13

-----, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Prurwokerto, Vol. 14, No.02, Mei 2014.hlm.216 - 226

Wijayanta, Tata, “Perlindungan Hukum Kreditur Separatis dalam Kepailitan”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Vol. 24, No. 2, Juni 2012. hlm. 1 - 13

Wibowo Hadiwardoyo, “Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19”, *Journal of Business and Entrepreneurship*, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, Vol. 2, No. 2, April 2020.hlm 87-88.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga No. 327/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.
tanggal 27 Desember 2022

Putusan Pengadilan Niaga No. 327/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.
tanggal 16 Februari 2023

Putusan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 18/PUU-XII/2019

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) (*Staatsblad* 1847 - 23).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (LN Nomor 131 Tahun 2004, TLN Nomor 4443).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (LN nomor 168 Tahun 1999, TLN Nomor 3889)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan ((LN Nomor 111 Tahun 2011, TLN Nomor 5253);

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*) Menteri Keuangan Republik Indonesia

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169 Tahun 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*).